

## PPP DAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN (STUDI ATAS PEMENANGAN ADE MUNAWAROH YASIN SEBAGAI BUPATI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018)

Siska Andrianika  
Staf Badan Pengawas Pemilu Kota Depok, Jawa Barat  
*email: andrianikasiska20@gmail.com*

*Paper Accepted: 25 Maret 2022*  
*Paper Reviewed: 02-08 April 2022*  
*Paper Edited: 09-19 April 2022*  
*Paper Approved: 21 April 2022*

### ABSTRAK

In this modern era, one of the strongest obstacle deterring the emergence of women's leadership are the cultural barriers that connected to cultural norms and even religious norms. In this regard, the succession of women's leadership has become an important agenda in order to create a non-patriarchal government. This research analyzes the leadership of women and Islamic political parties in the success of Ade Munawaroh Yasin becoming a Regent of Bogor Regency in 2018. The purpose of this research is to examine the perspective of the DPC PPP Bogor Regency on women's leadership, especially in the succession of Ade Munawaroh Yasin. The author used a qualitative method followed by a case study examination. The research data collection method was conducted by interview followed by documentation. The theoretical framework and concepts used in this study are the concept of Islamic parties and identity politics, gender and politics and also the concept of women's leadership. The research found that the DPC PPP Bogor Regency PPP no longer had a problem with women's leadership because that matter cannot be separated from the universal value of Islam embraced by PPP. This means that men and women have the same rights to become leaders on a micro and macro scale depend on the level of ability and quality of each individual.

**Keywords** : gender, Islamic parties, leadership and politics, women.

### PENDAHULUAN

Kontestasi pemilihan umum menjadi agenda demokrasi setiap lima tahun sekali untuk memilih dan mengganti anggota eksekutif juga legislatif. Pemilu dijadikan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilu juga menjadi salah satu tolak ukur seberapa demokratisnya sebuah negara. Sistem pemilu ini dijadikan perangkat untuk mengatur kontestasi perebutan kekuasaan di dalam demokrasi yang berasal

dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (Kartawidjaja and Aminuddin, 2014:115)

Pemilu di Indonesia, dilaksanakan sebanyak dua kali, yaitu pemilihan calon legislatif sebagai wakil rakyat di parlemen dan pemilihan presiden serta wakil presiden. Hal ini juga berlaku dalam konteks daerah yaitu Pilkada, yang meliputi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Pilkada di Indonesia adalah hasil dari tuntutan reformasi 1998 yang menganggap

perlunya partisipasi kuat dari masyarakat untuk terlibat langsung dalam pemilihan pemimpinnya. Sehingga Pilkada ini menjadi momentum demokrasi yang paling penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Disinilah partai politik berfungsi sebagai jembatan aspirasi rakyat. Oleh karenanya, pada tiap kontestasi pemilu, partai politik pasti akan mengusung calon-calon pemimpin pilihannya sesuai dengan kriteria dan syarat yang diajukan masing-masing partai. Ini menggambarkan bahwa peran partai politik sangat penting bagi keberlangsungan sebuah negara (Suyatno, 2016:224).

Di era reformasi partai Islam terbagi menjadi dua kategori. Pertama, parpol Islam berbasis massa (partai massa keagamaan), yaitu parpol yang memiliki massa muslim namun tidak menjadikan Islam sebagai ideologinya. Partai yang menganut basis massa tersebut dapat dijumpai pada Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di era reformasi. Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki pondasi kajian Islam karena dibangun oleh tokoh-tokoh Islam, seperti Amien Rais (Muhammadiyah) sebagai pendiri PAN dan Abdurrahman Wahid (NU) sebagai pendiri PKB). Kedua, parpol Islam berbasis ideologis yang menempatkan Islam sebagai dasarnya. Seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (Ihsan, 2016:2).

Dalam konteks demokrasi lokal, memilih pemimpin daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal serta mencari pemimpin yang berkualitas, jujur dan jauh dari korupsi. Ini dikarenakan, banyak daerah yang sebenarnya cukup dekat jaraknya dengan Ibukota Negara maupun Ibukota Provinsi, namun pembangunannya masih sangat buruk. Permasalahan yang sering muncul ialah tidak adanya transparansi dana oleh pejabat yang memimpin. Kabupaten Bogor, adalah salah satu wilayah yang memiliki permasalahan serupa.

Kabupaten Bogor sudah melaksanakan pemilihan bupati (Pilbup) pada tahun 2018. Dalam Pilbup 2018 tersebut, muncul sejumlah nama calon yang cukup kuat namanya muncul, diantaranya yaitu Ade Munawaroh Yasin, Ade Ruhandi, Adang Suptandar, Ade Wardhana, Bayu Syahjohan, Dace Supriyadi, Didin Supriyadin, Erik

Suganda, Gunawan Hasan, Iwan Setiawan, dan Nurhayanti seperti yang dilansir pojoksatu.id mengenai hasil polling nama calon bupati paling populer. Hasil ini didapat dari 100 tokoh yang menjadi responden. Mereka terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pengusaha, pimpinan komunitas di Bogor, serta para rektor perguruan tinggi. Pertanyaan yang diajukan kepada responden merupakan pengetahuan mengenai Pilbup Kabupaten Bogor (<http://pojoksatu.id>).

Ade Munawaroh Yasin atau yang akrab dipanggil AMY adalah salah satu nama calon yang ada pada pemilihan bupati Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tahun 2018. Ade Munawaroh Yasin memiliki sepak terjang yang cukup banyak dalam bidang politik, yaitu dua kali terpilih menjadi anggota DPRD, serta berhasil memimpin PPP memperoleh kursi lebih banyak pada pemilu legislatif lalu. Sejauh ini, Ade Munawaroh Yasin didukung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Gerindra. Latar belakang (track record) sosok atau partai sejauh ini masih menjadi acuan rakyat dalam memilih di pemilihan umum. Masyarakat sudah jauh lebih pintar dalam berpendidikan politik, ketika dijumpai bahwa masih terdapat oknum-oknum yang melakukan praktek money politic. Masyarakat hanya menerima uangnya namun belum tentu memilih calon yang melakukan praktek tersebut (Zaafri Razaqtiar, 2016:355).

PPP adalah partai yang menjadi bahasan penting bagi kemenangan Ade Munawaroh Yasin sebagai calon bupati. Hal ini dikarenakan PPP mengusung calon perempuan. Bila kita tinjau, PPP merupakan partai berbasis Islam. Hal ini menimbulkan pertanyaan, karena pembahasan mengenai kepemimpinan perempuan dalam Islam masih sering menjadi bahan perdebatan. Dalam penafsiran sejumlah ulama Islam, masih ada perbedaan pendapat mengenai kepemimpinan perempuan.

Sejarah Indonesia mencatat bahwa kita pernah satu kali dipimpin oleh seorang presiden perempuan yakni Megawati Soekarno Putri. PPP sempat menolak munculnya pemimpin perempuan seperti yang pernah disampaikan oleh Hamzah Haz

bahwa PPP terikat pada fatwa ulama (Tamyiz, 2001:60).

Keterangan yang diberikan oleh Hamzah Has tentu sangat bertolak belakang antara satu dengan yang lainnya, padahal pada Mukthamar ke IV tahun 1998, PPP memutuskan membentuk sebuah badan otonom perempuan yaitu WPP (Wanita Persatuan Pembangunan). Kemudian pada awal munculnya UU No.12 tahun 2003 yang membahas mengenai kuota perempuan 30% pun, PPP tidak begitu terlihat dipermukaan untuk membahas secara tegas bagaimana sikap PPP terhadap UU tersebut.

PPP dalam hal perspektifnya terhadap kepemimpinan perempuan, belum memiliki strategi yang rinci menjabarkan dan menuntaskan permasalahan pemimpin perempuan di Indonesia dalam AD/ART partainya. Berbeda dengan Partai berbasas Islam lainnya yaitu PKS yang justru sudah memiliki strategi yang jelas mengenai isu pemimpin perempuan yang tertuang pada platform kebijakan pembangunan PKS.

Sukses kepemimpinan tentunya menjadi agenda penting dalam sebuah partai saat mencalonkan dan memenangkan orang yang diusungnya. Ini disebabkan karena proses bergantinya kepemimpinan menjadi ajang pergumulan berbagai kepentingan politik. Sukses ini menjadi makin penting lagi ketika calon yang diusung adalah kandidat perempuan. Sukses terhadap kemenangan kandidat perempuan dalam bidang politik menjadi hal yang tidak pernah usai diperdebatkan. Isu diskriminasi terhadap kepemimpinan perempuan masih sangat kental di Indonesia.

Bila dilihat dari sisi lain, keputusan PPP dalam mengusung pemimpin perempuan yakni Ade Munawaroh Yasin, tidak dapat dilepaskan dari sisi pragmatis partai tersebut. Selain itu, hal ini tidak bisa dilepaskan juga dari nilai universal Islam yang diterima oleh PPP. Prinsip universalitas Islam dalam menyuarakan nilai-nilai kesetaraan. Kesetaraan pada konteks kepemimpinan ini berarti bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk menjadi pemimpin (Haris, 2015:89).

Ade Munawaroh Yasin yang merupakan adik kandung Rahmat Yasin, merasa sangat optimis untuk menang di pemilihan bupati Kabupaten Bogor tahun 2018. Rasa percaya

diri yang tinggi dari Ade Munawaroh Yasin serta pengalamannya menjadi DPRD, disambut baik oleh PPP. Hal ini yang akhirnya membuat PPP yakin untuk mengusung AMY.

Namun keputusan DPC PPP Kabupaten Bogor dalam mengusung AMY sebagai bupati Kabupaten Bogor menimbulkan sejumlah kontroversi. *Pertama*, AMY merupakan adik kandung Rahmat Yasin selaku bupati Kabupaten Bogor periode sebelum ia terpilih yang tersandung kasus korupsi dengan menerima suap 3 Miliar Rupiah yang diakuinya untuk keperluan politik. Sehingga DPC PPP Kabupaten Bogor seharusnya mempertimbangkan pencalonan AMY. Karena hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap elektabilitas dan penilaian AMY dari masyarakat kedepannya.

*Kedua*, adanya sikap politik yang pragmatis dari DPC PPP Kabupaten Bogor dalam mengusung calon perempuan. Dukungan DPC PPP Kabupaten Bogor terhadap perempuan disinyalir hanya untuk kepentingan politis saja bukan karena AMY memang calon yang berkualitas. Mengingat AMY pun sedang diusut oleh KPK terkait dugaan aliran dana suap yang menyangkut Rahmat Yasin. Dugaan ini diperkuat karena selama Rahmat Yasin menjabat, AMY diberikan wewenang untuk menyusun rancangan pejabat yang menjadi kepala dinas atau SKPD. Bahkan Ade Munawaroh selalu terlibat dalam rapat Baperjakat Pemerintah Kabupaten Bogor.

*Ketiga*, sikap politik DPC PPP Kabupaten Bogor dalam mencalonkan pemimpin perempuan bukan semata-mata karena DPC PPP Kabupaten Bogor menerima nilai-nilai universal yang ada pada ajaran Islam. Pandangan PPP sebagai partai berbasas Islam sering kali berubah-ubah mengenai kepemimpinan politik perempuan. Belum ada konsistensi antara pernyataan disatu waktu dengan waktu yang lainnya.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan dukungan data melalui wawancara. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau

bentuk hitungan lainnya dan bertujuan untuk mengungkapkan gejala secara kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrument kunci (Sugiarto, 2015:5).

Secara prosedur penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2006:4). Karena bersifat deskriptif, fokus penelitiannya menggunakan penjabaran teori mengenai PPP dan Kepemimpinan Perempuan (Studi Pemenangan Ade Munawaroh Yasin Sebagai Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2018).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu teknik wawancara dan studi literatur. *Pertama*, dalam teknik pengumpulan data melalui wawancara, penulis mengumpulkan data melalui komunikasi langsung dengan key informan (narasumber utama). Teknik wawancara ini sangat berguna untuk mengelaborasi data.

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai empat narasumber utama. Wawancara langsung dengan Achmad Baidowi selaku Wakil Sekretaris Jendral DPP PPP Periode 2016-2021, wawancara langsung dengan Ade Munawaroh Yasin selaku DPW PPP Jawa Barat Periode 2015-2020, wawancara langsung dengan Topik Masduki sebagai Wakil III Ketua Bidang Periode 2015-2020, dan wawancara langsung dengan Umi Muawanah selaku Ketua DPLN PPP Hongkong Periode 2016-2021. *Kedua*, studi literatur bersumber dari media cetak maupun elektronik, seperti jurnal, buku, artikel, skripsi, tesis, disertasi dan sumber-sumber media elektronik lainnya.

Untuk menganalisis data yang terhimpun, penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Proses ini diawali dengan menelaah seluruh data yang diperoleh, lalu dianalisis dengan serangkaian teori pendukung yang dirumuskan dan dipaparkan dalam kajian teori dan konsep mengenai partai Islam dan politik identitas, gender dan politik, serta kepemimpinan perempuan guna menjawab permasalahan pada penelitian penulis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perspektif DPC PPP Kabupaten Bogor Terhadap Kepemimpinan Politik Perempuan

PPP memiliki platform partai yang menggunakan ajaran Islam sebagai dasarnya. Dalam menjalankan fungsinya sebagai partai Islam, PPP memiliki prinsip-prinsip perjuangan yaitu prinsip ibadah, prinsip amar ma'ruf nahi munkar, prinsip kebenaran, kejujuran, dan keadilan, prinsip musyawarah, prinsip persamaan, kebersamaan, dan persatuan, serta prinsip istiqomah. Tujuannya agar terwujud masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir-batin, dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila. PPP yang berasaskan Islam ini, membawa visi serta misinya dengan nilai-nilai yang tidak lepas dari ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sejak awal didirikannya PPP pun, partai ini berfusi dengan golongan yang juga menggunakan ajaran Islam sebagai landasan jalannya roda partai. Sehingga PPP akan terus mendorong berbagai usaha dan kegiatan perpolitikannya dalam nuansa agama melalui peningkatan wawasan dan kesadaran serta penghayatan dan pengalaman ajaran agama dalam kehidupan perorangan maupun masyarakat.

Dalam rangka pengakomodasian asas Islam, maka PPP butuh seorang pemimpin yang mampu membawa substansi ajaran agama Islam ke dalam ideologi Pancasila yang dianut di Indonesia. PPP mengusulkan agar nilai-nilai spiritual, instrumental, dan seremonial agama senantiasa hadir dalam upaya pembangunan berbagai bidang di Indonesia tanpa mengesampingkan peranan Pancasila sebagai ideologi negara. Selain itu, PPP juga berupaya untuk meningkatkan keikutsertaan kader perempuannya untuk memenuhi affirmative action agar tercipta kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini tentunya menjadikan banyak kader perempuan PPP yang ikut dalam kontestasi legislative maupun kepala daerah.

Bila dilihat dari tujuan partai PPP, memang pembahasan mengenai kepemimpinan perempuan tidak disinggung dalam AD/ART. Namun dalam praktiknya, PPP di beberapa wilayah sudah mendukung kepemimpinan politik perempuan dengan

memberikan posisi strategis partainya kepada perempuan. Adanya terminologi antara ruang publik dan ruang privat dalam tatanan masyarakat yang berkaitan dengan konsep gender, pada akhirnya menciptakan fenomena ketidakadilan diantara laki-laki dan perempuan. Namun hal tersebut ternyata tidak terjadi di tubuh PPP. Perempuan dapat berkiprah dan memiliki posisi yang strategis ketika terlibat dalam politik praktis. Maka dengan demikian, PPP tidak memperlakukan laki-laki atau perempuan yang menjadi pemimpin sebagai individu yang mengkomodifikasi kepentingan partai.

Kepemimpinan perempuan tidak lagi menjadi problem bagi PPP khususnya di wilayah DPW PPP Provinsi Jawa Barat yang termasuk di dalamnya Kabupaten Bogor. Mekanisme rekrutmen dan juga kaderisasi internal PPP bagi kader perempuan sudah berlangsung secara terarah. Dalam kegiatan-kegiatan harian maupun nasional, DPC PPP Kabupaten Bogor sudah melibatkan kader-kader perempuannya.

Meskipun wacana mengenai kepemimpinan perempuan di Indonesia masih menjadi polemik bagi sebagian kalangan masyarakat, pembahasan mengenai kepemimpinan perempuan dalam jabatan politik muncul relatif baru. Topik ini mulai ramai diperbincangkan tepatnya saat Abdurrahman Wahid (Gus Dur) lengser dari jabatan presidennya dan digantikan oleh Megawati Soekarno Putri yang merupakan seorang perempuan. Terlepas dari hal itu, PPP yang menggunakan asas Islam memperbolehkan perempuan untuk ada di posisi strategis partai seperti ranah legislatif maupun eksekutif. PPP merasa rakyat Indonesia yang mayoritasnya menganut agama Islam memiliki jiwa religius yang tinggi sehingga harus terus diperjuangkan dan dipertahankan suaranya. Nilai-nilai Islam ini kemudian harus dijadikan sebagai sumber moral serta etik dalam pembangunan nasional.

Dalam kaitannya, kepemimpinan harus mencakup tiga hal. Pertama, kekuasaan yang berarti kewenangan untuk menggerakkan orang-orang yang ada disekitarnya untuk mengikuti kehendaknya dalam mencapai tujuan dan kepentingan yang telah ditentukan. Kedua, kewibawaan yaitu keunggulan yang dimiliki oleh seorang

pemimpin sehingga membedakannya dengan yang dipimpin. Ketiga, kemampuan yaitu memiliki daya melebihi orang yang lain. DPC PPP Kabupaten Bogor merasa bahwa kader perempuannya banyak yang sudah memiliki ketiga cakupan kepemimpinan tersebut terutama Ade Munawaroh Yasin, sehingga dukungan yang diberikan kepadanya memiliki dasar yang jelas bukan hanya urusan kepentingan politik saja.

Persaingan kepemimpinan perempuan dan laki-laki yang ada, tentunya memunculkan beragam gaya dan kualitas kepemimpinan. Selain hal itu, ketika kepemimpinan dikomandoi oleh perempuan maka lapis tantangan yang akan dihadapinya semakin berat. Lapis tantangan tersebut diantaranya ialah pemimpin perempuan harus sanggup meyakinkan publik dan bawahannya bahwa ia tidak akan menjalankan kepemimpinan yang berbeda dengan laki-laki. Perempuan yang sudah memimpin ini diharuskan menampilkan keunggulan-keunggulan yang objektif dibanding keunggulan khasnya sebagai perempuan.

Sebagai salah satu institusi demokrasi, PPP memiliki peran penting dalam melakukan pemberdayaan perempuan di bidang politik. Peran yang paling utama adalah melakukan pemberdayaan serta pembinaan. Dalam pemberdayaan kader perempuan ini, PPP membuat badan otonom yang dikhususkan untuk kader perempuannya. Badan otonom ini bernama WPP (Wanita Persatuan Pembangunan). WPP dijadikan wadah untuk mengasah kemampuan kader perempuan yang materinya membahas seputar kepemimpinan serta advokasi.

Perempuan pada dasarnya memiliki potensi yang cukup besar dalam sebuah kepemimpinan sebab mempunyai fungsi reproduksi yang tidak dimiliki oleh laki-laki yaitu fungsi mengandung, melahirkan, menyusui. Sehingga naluri ini yang menumbuhkan (membesarkan), melindungi, dan mendamaikan. Partai politik dalam hal ini PPP, memiliki kontribusi dalam mengusung perempuan menjadi seorang pemimpin. Pertama, terkait dengan hak-hak politik perempuan yang tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia. Kedua, pandangan dari kelompok-kelompok di masyarakat yang berbeda mengenai kepemimpinan

perempuan harus tetap dipertimbangkan dalam formulasi kebijakan yang ada pada sistem demokrasi. Ketiga, terkait pada jumlah kuantitas bahwa perempuan merupakan sebagian besar dari penduduk Indonesia. Keempat, perempuan merupakan bagian terbesar dari masyarakat yang berada dalam garis kemiskinan dan keterbelakangan diberbagai bidang sehingga sosok pemimpin yang berasal dari kaum perempuan bisa menjadi solusi karena akan lebih mengerti apa yang diperlukan oleh perempuan itu sendiri.

Seorang perempuan dalam kepemimpinannya juga harus memiliki kemampuan untuk mengeliminasi kekhasan alamiahnya sebagai seorang perempuan dalam melihat dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Selain itu, pemimpin perempuan harus memiliki mental yang kuat serta daya tahan yang tinggi dalam menghadapi arena pertarungan politik yang tidak dapat diprediksi. Pemimpin perempuan disini diharuskan membekali dirinya dengan kemampuan perspektif dan jangkauan pandangan yang komperhensif. Pemimpin perempuan harus memiliki kesadaran penuh bahwa selain ia memegang tanggungjawab publik, ia tetap tidak boleh abai terhadap peran domestiknya.

Dukungan DPC PPP Kabupaten Bogor terhadap pencalonan dan kemenangan Ade Munawaroh Yasin dalam pemilihan umum kepala daerah sebagai Bupati, sudah menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan bukan lagi menjadi persoalan. Keterlibatan perempuan menjadi pemimpin sangat diperlukan untuk menciptakan kebijakan yang sensitif gender. Perempuan ketika sudah memimpin diharapkan akan mengeluarkan kebijakan yang mampu mengurangi *gender gap*.

Selama ini perempuan selalu menempati rangking pertama dalam ketertindasan dan kesengsaraan dalam memperjuangkan keberlangsungan hidup. Akses bagi perempuan dibatasi dalam sistem patriarkis, yang diambil alih oleh sistem kapitalisme yang pada kenyataannya menjadi perpanjangan tangan sistem patriarki itu sendiri. Maka dari itu ketika politik diberi makna sebagai kegiatan yang mengambil keputusan dari ruang publik yang kebijakannya berdampak luas bagi masyarakat secara keseluruhan,

maka asumsi yang menyatakan perempuan tidak layak ikut serta sudah tidak lagi relevan.

Peranan gender dalam politik mampu menghasilkan keterwakilan sebagai keberadaan fisik yang mewakili perempuan lainnya bila diartikan dengan cara deskriptif. Kemudian, secara substantif keterwakilan perempuan ini dijadikan substansi pengetahuan yang hendak disampaikan oleh perempuan sebagai wakil dari perempuan yang diwakilinya. Keterbukaan terhadap kepemimpinan akan membentuk kehadiran transformasi personal yang melalui dirinya bisa mempengaruhi cara pandang dan perubahan-perubahan sistem secara politik. Dengan diberikannya hak dalam berpolitik bagi Ade Munawaroh Yasin, maka DPC PPP Kabupaten Bogor berkeyakinan bahwa kepemimpinan AMY dapat menciptakan berbagai kebijakan yang tidak bias gender.

Ada labirin kepemimpinan yang bisa menerangkan bahwa pemimpin laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama walaupun sejak lama sudah ada kesenjangan kepemimpinan perempuan. Labirin ini didasarkan pada modal manusia yang berupa pendidikan, pengalaman kerja, dan peluang pengembangan diri.

Kemudian labirin perbedaan gender yang berupa promosi diri, negosiasi, gaya kepemimpinan, dan komitmen serta motivasi. Selanjutnya labirin prasangka yang berupa persepsi, serta kerentanan dan reaksi motivasional karena merasa akan dibatasi (Northouse, 2013:331).

Bila dielaborasi dengan konsep labirin kepemimpinan, maka DPC PPP Kabupaten Bogor melihat bahwa sosok AMY telah memiliki privilege sejak ia lahir. Hal ini dilirik dan dijadikan sebagai salah satu pertimbangan DPC PPP Kabupaten Bogor dalam mendukung Ade Munawaroh Yasin. AMY dinilai memiliki garis keturunan yang berkecimpung di dunia politik. Riwayat pendidikan AMY bagus dan AMY dilibatkan dalam kepengurusan partai sebagai modal pengembangan diri. Selain itu, AMY memiliki wadah yang cukup besar melalui PPP untuk dijadikan tempat promosi diri dan negosiasi. AMY nyatanya mampu menepis kerentanan bahwa perempuan akan dibatasi ruang geraknya.

Pertimbangan DPC PPP Kabupaten Bogor dalam mendukung Ade Munawaroh

Yasin pada pemilihan bupati tahun 2018 lalu, tentu melakukan sejumlah rapat serta musyawarah sesuai ketentuan AD/ART partai yang berlaku. Secara garis besar, struktur organisasi PPP terdiri dari Dewan Pimpinan Pusat dan Majelis Pertimbangan yang terdiri atas Daerah Tingkat I yaitu Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Daerah Tingkat II yaitu Dewan Pimpinan Cabang (DPC), anak cabang PPP yang dipimpin oleh Pimpinan Anak Cabang (PAC) serta Ranting PPP yang dipimpin oleh Pimpinan Ranting (Abidin Amir, 2003:174).

Berkenaan dengan pertimbangan dan latar belakang DPC PPP Kabupaten Bogor mendukung Ade Munawaroh Yasin, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Pada tubuh PPP sendiri, ada tiga jenis permusyawaratan yaitu di tingkat Wilayah, Cabang, Anak Cabang dan Ranting. Musyawarah tersebut berbentuk musyawarah dalam seluruh urusan aspek keputusan, musyawarah kerja dan juga rapat pimpinan. Jika cara ini tidak menghasilkan keputusan, maka partai memberi jalan keluar berupa voting berdasarkan suara terbanyak.

DPC PPP Kabupaten Bogor mendukung kemenangan Ade Munawaroh Yasin dengan melihat sepak terjang karir politiknya serta program yang ingin dicanangkan. Karir politiknya antara lain menjadi Majelis Pakar DPC PPP Kabupaten Bogor (2005-2010). Kemudian menjabat sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Bogor (2010-2015). Serta masih memegang posisi sebagai Ketua DPW PPP Provinsi Jawa Barat (2015-2020).

Selain itu dalam ranah pemerintahan, Ade Yasin pernah terpilih dua periode sebagai DPRD Kabupaten Bogor periode pertama yaitu 2004-2009 dan periode kedua 2009-2014 menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor. Pada pemilihan Bupati Kabupaten Bogor tahun 2018 lalu, Ade Yasin mencalonkan diri didampingi calon wakil bupati Iwan Setiawan yang didukung oleh PPP, PKB, dan Gerindra. Ade memenangkan pemilihan tersebut setelah meraih suara tertinggi sebanyak 912.221 suara atau 41,12% mengalahkan empat pasangan calon lainnya (<http://adeyasin.net>). Program Pancakarsa yang disusun oleh Ade Munawaroh Yasin juga menjadi salah satu faktor pertimbangan

DPC PPP Kabupaten Bogor memberi dukungan.

Keputusan yang diambil oleh DPC PPP Kabupaten Bogor dimusyawarahkan ditingkat cabang dan berkonsultasi dengan pengurus tingkat wilayah serta pusat. Prosedur ini dilakukan agar keputusan yang dikeluarkan oleh tingkat cabang, diketahui pula sampai ke pengurus paling tinggi. Sehingga segala jenis hasil keputusan yang diambil dapat dipertanggung jawabkan sebagai keputusan bersama. Pada umumnya, sebuah keputusan yang keluar dari partai pasti akan menimbulkan berbagai perbedaan pendapat. Namun, dalam studi kasus kemenangan Ade Munawaroh Yasin ini, semua pengurus dari tingkat DPC, DPW sampai DPP memiliki kesamaan pendapat untuk mendukung. Baik cabang maupun pusat, sudah menilai bahwa sosok Ade Munawaroh Yasin ini mampu mengemban amanah yang lebih besar karena sudah memiliki sepak terjang yang cukup panjang menjadi seorang pemimpin.

Penulis melihat ada upaya dinasti politik yang sedang dibangun oleh keluarga besar "Yasin". Hal ini dapat terlihat dari keterlibatan keluarga "Yasin" dalam posisi strategis di wilayah Kabupaten Bogor. Dalam kepemimpinan partai DPC PPP Kabupaten Bogor, yang semula diisi oleh Ade Munawaroh Yasin kini bergeser kepada istri Rachmat Yasin yaitu Elly Rachmat Yasin. Posisi Bupati Kabupaten Bogor yang dahulu dipimpin oleh Rachmat Yasin pun, kini dijabat oleh adiknya yaitu Ade Munawaroh Yasin. Kini, Elly Rachmat Yasin pun menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024.

Dalam kaitannya terhadap hasil keputusan yang dikeluarkan DPC PPP Kabupaten Bogor, Ade Munawaroh Yasin menyampaikan bahwa dirinya optimis akan didukung penuh oleh partainya mengingat ia sudah pernah mengabdikan dan menjabat di kepemimpinan PPP sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Bogor sampai ke jenjang yang lebih luas yaitu DPW PPP Provinsi Jawa Barat.

Dukungan yang diberikan oleh DPC PPP Kabupaten Bogor kepada Ade Munawaroh Yasin memiliki hal yang kontradiktif. Penulis melihat bahwa PPP melakukan inkonsistensi dalam pemberian dukungan terhadap suatu calon. Ini dilihat

dari pengalaman masa lalu PPP yang pernah mengeluarkan pendapat untuk tidak mendukung kepemimpinan perempuan yang diungkapkan oleh Hamzah Haz, Ketua PPP periode 1998-2007 ketika Megawati maju menjadi calon presiden. Penulis melihat bahwa penolakan PPP terhadap Megawati bukan karena ia kader PDIP yang didominasi oleh non-Muslim, akan tetapi karena Megawati seorang perempuan. Hamzah Haz mengatakan bahwa hal tersebut sudah menjadi harga mati dan pendapat para ulama. Menurutnya, meskipun perempuan dimuliakan dan dihormati dalam Islam, tetapi kalau untuk menjadi pemimpin itu soal lain. PPP tidak menjadi oposisi tapi kembali mengikuti ajaran Islam agar tercipta amar makruf nahi munkar (Noer, 1999:375).

Mengenai hal tersebut, DPC PPP Kabupaten Bogor memberi pandangan bahwa setiap kepemimpinan PPP memiliki keputusan tersendiri mengenai penafsiran kepemimpinan perempuan sesuai dengan kondisi politik yang berlangsung pada waktu itu. Sikap DPC PPP Kabupaten Bogor yang mendukung Ade Munawaroh Yasin, bisa dilihat dari berbagai sisi. Pertama, pertimbangan tersebut dianggap tidak bertentangan dengan nilai dan perjuangan PPP, bahwa seorang perempuan boleh menjadi pemimpin. Kedua, pertimbangan ini didasari dengan kepentingan politik yang transaksional dan menguntungkan bagi partai.

Menanggapi pernyataan penulis, Ade Munawaroh Yasin memberikan penjelasan bahwa tidak ada motif kepentingan transaksional dalam pemberian dukungan DPC PPP Kabupaten Bogor terhadap pemenangan dirinya di pemilihan bupati lalu. Ini murni diberikan karena melihat pengalaman yang Ade Munawaroh Yasin miliki. Melalui pertimbangan DPC PPP Kabupaten dalam mendukung pemenangan Ade Munawaroh Yasin ini, maka bisa dikaitkan pula dengan platform partai yang melekat pada tubuh PPP.

Menurut Saiful Mujani seperti yang dikutip dari (<http://www.jawapos.com>), partai Islam di Indonesia secara garis besar dapat dibagi menjadi dua. Pertama, partai yang berbasis organisasi kemasyarakatan (ormas) keislaman, seperti PKB dan PAN. Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai

Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki akar kajian Islam karena pembentukannya dibangun oleh tokoh-tokoh yang berasal dari organisasi kemasyarakatan Islam, seperti Amien Rais yang lekat dengan ajaran Muhammadiyah sebagai pendiri PAN dan Abdurrahman Wahid (NU) sebagai pendiri PKB. Kedua, partai yang secara eksplisit berplatform Islam sebagai asas ideologinya, seperti PKS, PPP, dan PBB.

Partai Islam bisa menjadi besar dalam suatu negara, salah satunya disebabkan karena negara tersebut memiliki mayoritas penduduk beragama Islam. Basis sosiologis suatu partai adalah ideologi dan kepentingan yang diarahkan pada usaha-usaha untuk memperoleh kekuasaan (Sobron, 2013:15).

Perlu ada partai ideologis di Indonesia yang mampu menguatkan identitas umat Islam serta mewadahi aspirasi umat Islam namun tetap menjadikan Islam sebagai landasan pergerakannya. Ada beberapa hal yang menjadi penting. Pertama, Indonesia memiliki mayoritas penduduk beragama Islam yang berarti bahwa mereka butuh wadah untuk menyalurkan aspirasi serta gagasan di tempat yang sesuai dengan identitasnya. Kedua, partai politik Islam yang hari ini mencantumkan Islam sebagai asas, telah muncul dengan penampilan dan pemaknaan yang baru sesuai perkembangan zaman.

PPP bisa menjadi salah satu wadah aspirasi umat Islam di Indonesia. Hal ini dikarenakan PPP menjadikan Islam sebagai asas atau landasan dalam menjalankan roda partainya. Dalam hal ini, PPP menggunakan basis sosial dari massa yang menganut agama Islam untuk mendapat dukungan dalam rangka mencapai kekuasaannya. Pengelompokan partai di Indonesia ada yang berasaskan Islam.

PPP sendiri bisa dikelompokkan ke dalam partai berbasis Islam yang tradisional, yaitu memiliki basis pemilih dan pendukung dari kalangan muslim yang berpegang teguh pada ajaran-ajaran Islam. Terutama pada tradisi Islam yang melekat pada keseharian masyarakat muslim di Indonesia. Tradisi Islam yang dimaksud ini sudah mengalami akulturasi dengan budaya yang ada Indonesia. Kelompok ini tumbuh dan berkembang dari basis sosial yang merujuk pada organisasi Islam tradisional terbesar, yaitu NU. Secara



kultural, ajaran-ajaran NU ini mudah diterima oleh masyarakat secara luas karena sifatnya yang toleran dan terbuka pada perbedaan sehingga banyak muslim yang mau mendukung partai yang memiliki nilai-nilai perjuangan yang serupa.

Partai politik Islam tradisional memiliki kesamaan identitas antara elite dan basis pendukung. Hal inilah yang menjadi pertimbangan DPC PPP Kabupaten Bogor ketika mendukung Ade Munawaroh Yasin. DPC PPP Kabupaten Bogor melihat bahwa basis-basis massa yang dimiliki oleh Ade Munawaroh Yasin serupa dengan identitas yang melekat pada Ade Munawaroh Yasin yaitu muslim. Ade Munawaroh Yasin memiliki basis massa dari kalangan NU, ibu-ibu PKK serta organisasi masyarakat Islam lainnya.

Jika melihat sejarah, PPP sudah terlibat mengikuti pemilu sejak 1977 sampai dengan saat ini. Ketika reformasi, pada Muktamar ke IV PPP akhirnya memutuskan untuk kembali ke Khittah Islam dengan penggunaan lambang Ka'bah dalam partainya. Hal ini menunjukkan bahwa PPP ingin kembali mengembangkan paradigma Islam sebagai rahmat bagi alam semesta. Disisi lain, PPP juga berupaya untuk selalu menghormati pluralisme dan kebhinekaan sebagai kekayaan budaya dan sumber perekat kekuatan, bukan sebagai disintegrasi. Tekanan dan sikap diskriminatif yang diterima oleh PPP pada masa Orde Baru, membuat partai ini semakin bersifat kritis dan semakin menggebu dalam memperjuangkan hak konstituennya (Warits, 2010:152).

Landasan ideologi yang dipakai oleh partai ini adalah amar ma'ruf nahi munkar, yang berisi kejujuran, nilai-nilai kebenaran, keadilan dan keikhlasan. Semua hal tersebut akan tercapai melalui keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT (Al Hamdi, Ridho, 2013:105). Sebagai partai politik Islam, PPP memiliki tujuan kuat mengembangkan paradigma Islam sebagai agama rahmatan lil'alamin. Bentuk perwujudannya, PPP mengutamakan nilai demokrasi, kebenaran, persamaan hak, persaudaraan, kerjasama, toleransi dan saling pengertian. Sehingga, dukungan DPC PPP Kabupaten Bogor terhadap Ade Munawaroh Yasin dirasa masih sejalan dengan nilai perjuangan PPP.

Salah satu ciri yang paling terlihat dari politik modern adalah pengakuan yang besar terhadap perbedaan budaya dalam masyarakat yang sering digambarkan sebagai politik identitas. Perbedaan yang ada dapat dilihat salah satunya dari isu seputar gender. Dalam pertimbangannya mendukung Ade Munawaroh Yasin, DPC PPP Kabupaten Bogor tentu melihat akan munculnya isu gender yang diangkat dalam proses pemenangan.

Untuk meraih adanya kesetaraan dan keadilan gender di dalam suatu tatanan masyarakat, maka perempuan harus diberikan kesempatan yang sama seperti laki-laki, baik dalam pendidikan, jabatan-jabatan umum, dan kesempatan lainnya seperti laki-laki. Dengan diberikannya dukungan terhadap pemenangan Ade Munawaroh Yasin, maka ketika memimpin, kebijakan yang diputuskan tidak bias gender. Sehingga ketimpangan gender yang selama ini terkonstruksi dalam masyarakat bisa dihilangkan melalui sosok kepemimpinan Ade Munawaroh Yasin. Ketimpangan gender yang ada di masyarakat bahwa perempuan kurang layak menjadi pemimpin bisa kita kaitkan dengan politik identitas yang melekat dalam individu Ade Munawaroh Yasin sebagai Bupati Kabupaten Bogor. Ade Munawaroh Yasin sebagai seorang individu mampu mengkonstruksi identitas ini yang terbentuk berdasarkan pada sejarah hidupnya, juga perangkat kekuasaan yang dimilikinya. Ade Munawaroh Yasin yang merupakan warga pribumi dengan agama Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Kabupaten Bogor secara jelas teridentifikasi sebagai individu yang tidak terpisah dari masyarakat asli Kabupaten Bogor walaupun dalam dirinya melekat pula identitas kesukuan yaitu Sunda (Castells, 2003:7).

Di Kabupaten Bogor, PPP sangat dominan dalam artian sudah beberapa kali Bupati yang memimpin berasal dari partai tersebut. Identitas yang melekat dalam PPP sebagai partai Islam, pada akhirnya dijadikan salah satu strategi memenangkan Ade Munawaroh Yasin dalam kontestasi Pilbup (pemilihan bupati) tahun 2018 untuk mengambil simpati masyarakat yang berbasis agama Islam. Dari segi konstituennya, PPP memiliki mayoritas pendukung dan pemilih dari kelompok muslim dengan varian yang beragam yaitu abangan, santri ataupun elit.

Partai Islam terutama PPP pernah mengalami kekalahan dan penurunan suara sehingga akhirnya perlu menyelaraskan ajaran agama Islam dengan universalitas itu sendiri sebagai sebuah identitas. Pada tiap kontestasi pemilu, identitas partai ini digunakan untuk menarik simpati dan suara rakyat dalam mengusung calon-calon pemimpin pilihannya sesuai dengan kriteria dan syarat yang diajukan masing-masing partai. Ini menggambarkan bahwa peran partai politik sangat penting dalam proses pembentukan pembangunan identitas yang berupa legitimasi identitas (*legitimizing identity*).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah penulis lakukan serta pemahaman penulis terhadap teori-teori yang digunakan, dapat disimpulkan bahwa Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bogor memandang bahwa kepemimpinan perempuan sudah tidak menjadi masalah. Posisi-posisi strategis dalam struktur kepengurusan partai dari tingkat pusat hingga daerah sudah banyak diisi dan dipercayakan kepada perempuan. Dalam kaitannya terhadap kemenangan Ade Munawaroh Yasin, DPC PPP Kabupaten Bogor beralasan bahwa kepemimpinan perempuan patut didorong dan didukung penuh apa bila calon yang diusung memiliki kapabilitas yang mumpuni serta masih sesuai dengan enam prinsip perjuangan PPP yaitu prinsip ibadah, prinsip amar ma'ruf nahi munkar, prinsip kebenaran, kejujuran, dan keadilan, prinsip musyawarah, prinsip persamaan, kebersamaan, dan persatuan, serta prinsip istiqomah.

Pertimbangan DPC PPP Kabupaten Bogor dalam mendukung kemenangan Ade Munawaroh Yasin di pemilihan Bupati Kabupaten Bogor tahun 2018 didasari pada track record (sepak terjang) yang dimiliki oleh Ade Munawaroh Yasin serta keaktifannya di banyak organisasi. Ade Munawaroh Yasin juga pernah menjadi Ketua DPRD Kabupaten Bogor sehingga dianggap memiliki modal sosial yang cukup besar. Selain itu, Ade Munawaroh Yasin juga memiliki dukungan partai-partai politik yang memiliki kursi cukup besar di Kabupaten

Bogor. Dengan melihat peluang besar yang dimiliki oleh Ade Munawaroh Yasin itu lah, maka DPC PPP Kabupaten Bogor merasa perlu mendukung pemenangannya di pemilihan bupati tahun 2018 lalu. Dalam proses pengajuan nama Ade Munawaroh Yasin pun, tidak ada satu pihak pun yang menolak dirinya untuk maju ke pilbup 2018 lalu sehingga DPC PPP Kabupaten Bogor memutuskan mendukung pemenangannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Amir, Zainal. (2016). Peta Islam Politik: Pasca Soeharto. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Al Hamdi, Ridho. (2013). Partai Politik Islam. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bakir Ihsan, A. (2016). Ideologi Islam dan Partai Politik. Jakarta: Orbit Publishing.
- Castells, Manuel. (2003). The Power Of Identity: The Information Age, Economy, Society and Cultural. Australia: Blacwell Publishing.
- Editor. (2018). "Inilah Hasil Polling Bakal Calon Bupati Bogor Paling Populer 2018". Diakses 10 Oktober 2017, dari: <http://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2017/07/31/inilah-hasil-polling-bakal-calon-bupati-bogor-paling-populer-2018/>
- Ervan. (2018). "Profil Ade Yasin Munawaroh". Diakses 15 Oktober 2018, dari: <http://adeyasin.net>
- Editor. (2019). "Kisruh PPP dan Masa Depan Partai Islam". Diakses 20 Juni 2019 dari: <http://www.jawapos.com/baca/artikel/7048/Kisruh-PPP-dan-MasaDepan-Partai-Islam>
- G. Northouse, Peter. (2013). Kepemimpinan. Jakarta: Indeks.
- Haris, Munawir. (2015). "Kepemimpinan Perempuan dalam Islam". Dalam Jurnal Studi Keislaman, Volume 15, Nomor 1, Juni.
- Moleong, Lexy J. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosdakarya.
- Noer, Deliar. (1999). Mengapa Partai Islam Kalah: Perjalanan Politik Islam dari Pra-Pemilu '99 sampai Pemilihan Presiden. Jakarta: Alvabet.

- R.Kartawidjaja, Pipit dan M Faishal Aminuddin (2014). *Demokrasi Elektoral (Bagian I): Perbandingan Sistem dan Metode dalam Kepartaian dan Pemilu*. Surabaya: Sindikasi Indonesia.
- Sobron, Sudarno. (2013). "Prospek Partai Islam Ideologis di Indonesia". Dalam *Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1, Juni.
- Sugiarto, Eko. (2015). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media.
- Suyatno. (2016). "Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia". Dalam *Jurnal Indonesian Political Science Review*.
- Tamyiz. (2011). "Presiden Perempuan: Menimbang Perspektif Ulama dan Feminis Muslim Kontemporer". Dalam *Jurnal Hukum Islam Al Mawarid* Vol VIII.
- Warits, Abd., Abdul Wahid, Fathol Alif, dkk. (2010). *Kajian Islam Multidisipliner*. Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Zaafri Razaqtiar, Arief. (2013). "Peran Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah: Studi Upaya Partai Golkar dalam Memenangkan Pasangan Calon Juliyatmono-Rohadi di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013". Dalam *Jurnal Politik Muda*, Vol.5, No.3, Agustus- Desember.